

EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PELAKSANAAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

Della Ameliya Putri¹, Tsania Nur Alifah², Titis Purwaningrum³

¹ Universitas Muhammadiyah Ponorogo

¹ dellaameliya9@gmail.com, ² tsanianuralifah1307@gmail.com, ³ ning.titisumpo@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan dan pelaksanaan laporan keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. SIPD merupakan sebuah sistem yang dirancang khusus untuk meningkatkan tingkat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mendalam. Proses dalam mengumpulkan data dilakukan dalam berbagai cara, termasuk wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan, pengamatan langsung terhadap proses kerja, serta analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan SIPD. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan SIPD telah memberikan efek positif pada kecepatan dan ketepatan penyusunan laporan keuangan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dan permasalahan terkait teknis dalam penggunaan sistem. Studi ini merekomendasikan peningkatan pelatihan untuk pengguna SIPD serta penguatan infrastruktur teknologi sebagai dukungan untuk mengoptimalkan penerapan SIPD. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk pemerintah daerah lainnya dalam mengembangkan pengelolaan laporan keuangan.

Kata Kunci: Penerapan Sistem, SIPD, Kualitas Keuangan, Dinas Kesehatan

Abstract: *The purpose of this study is to evaluate the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in the preparation and execution of financial reports at the Health Office of Ponorogo Regency. The SIPD is a system designed to increase transparency, accountability, and efficiency in financial management within regional governments. A variety of methods were used to collect data. Nonetheless, a number of obstacles still exist, including the scarcity of skilled human capital and technological problems with system operation. To maximize the system's deployment, the report suggests bolstering technological infrastructure and expanding training for SIPD users. It is intended that this study will help other regional governments handle their financial reports better by providing guidelines.*

Keywords: System Implementation, SIPD, Financial Quality, Health Service

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mendorong perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Teknologi informasi kini digunakan secara luas untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah bisa menggunakan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan pemerintahan. Misalnya melalui pengelolaan keuangan. Perubahan sistem pemerintahan daerah di Indonesia dari yang sebelumnya bersifat sentralistik menuju otonomi daerah telah membawa pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan cakupan tugas pemerintah secara keseluruhan. Dampak ini juga dirasakan secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan perubahan ini, tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah dan keterbukaan informasi publik semakin meningkat (Fatmawati, 2024).

Di tingkat pemerintah daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah diimplementasikan sebagai satu diantara beberapa cara untuk membantu proses perancangan, penganggaran, pelaporan, dan pemantauan keuangan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah terobosan baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia. SIPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019, yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 27 September 2019. Kehadiran SIPD ini menggantikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang sebelumnya digunakan. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk menyempurnakan sistem pengelolaan informasi di tingkat daerah, dengan menekankan pada aspek transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (Tumija, 2023). Sistem Informasi Pemerintah Daerah diwujudkan dan diberlakukan untuk menciptakan fasilitas informasi pemerintah daerah yang terpadu dan dalam bentuk digital dan dapat dikelola dengan cara *login* ke situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menyediakan informasi terkait penerapan dan penggunaan sistem ini. SIPD ini dirancang untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih efisien dan transparan, memastikan bahwa setiap tahap perencanaan dapat dipantau dan dikelola dengan baik, serta memfasilitasi akuntabilitas publik dalam pengelolaan pemerintahan daerah (Fatmawati, 2024).

Badan Pelaksana Keuangan Daerah (BPKP) merespon Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah mengarah pada peluncuran aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Indonesia pada tahun 2006. Seiring dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menggantikan SIMDA. Sebelumnya, pedoman terkait tata kelola keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang menjadi acuan utama dalam sistem manajemen keuangan daerah sebelum adanya perubahan dengan SIPD, akan tetapi dokumen ini telah digantikan oleh Permendagri No. 77 Tahun 2020. Berbeda dengan SIMDA yang tidak memiliki struktur data yang terpadu, SIPD mengefektifkan sosialisasi peraturan pemerintah daerah informasi terkait kepada masyarakat luas melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terpusat (Saleh, 2023).

Secara umum, sistem informasi pemerintah adalah kombinasi dari *hardware*, *software*, dan *staff* yang bekerja secara berurutan untuk memotivasi satu sama lain dalam mengolah data guna menghasilkan informasi. Supaya tercapainya suatu target dalam berorganisasi di semua level Pemerintah Daerah dan memberikan fasilitas kepada masyarakat, SIPD merupakan pengelolaan informasi secara terstruktur sesuai kinerja dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Mewujudkan keterbukaan informasi publik merupakan tujuan dari SIPD. Standar minimum yang harus dipenuhi SIPD diatur UU Nomor 14 tahun 2008 tentang transparansi Informasi Umum menetapkan tentang kewenangan warga negara untuk mendapatkan informasi publik. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dikelola oleh badan publik, termasuk informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu prospek dari sistem administrasi yang baik adalah transparansi, berdasarkan pada arus informasi yang otonom. (Tumija, 2023).

Kabupaten Ponorogo merupakan satu dari banyaknya daerah yang ada di Indonesia yang telah menerapkan SIPD dalam manajemen laporan keuangan di berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo memiliki peran penting dalam penyediaan

layanan kesehatan kepada masyarakat. Agar layanan kesehatan dapat berjalan optimal serta pengelolaan anggaran keuangan yang transparan. SIPD ini adalah sebuah situs web yang dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengawasan serta evaluasi layanan publik. Penerapan SIPD bertujuan untuk meningkatkan dan menyederhanakan percepatan pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan pemerintahan, khususnya dalam perencanaan oleh pemerintah daerah. (Jadongan Sijabat, 2024). Akan tetapi dalam penerapannya pengelolaan laporan keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang sering kali dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah, seperti jaringan internet yang kurang stabil karena banyaknya orang yang mengakses web SIPD pada waktu yang bersamaan. Kemudian dari aplikasi atau web SIPD yang belum maksimal sehingga sering terjadi server down. Situasi ini tentu dapat mempengaruhi efektivitas penerapan SIPD dan hasil dari laporan keuangan yang disajikan.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi penerapan SIPD adalah pengguna SIPD, yaitu pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, yang mana kebiasaan kerja sebelumnya cenderung manual sehingga para pegawai belum terbiasa dengan system yang berbasis teknologi. Pada sisi struktural, koordinasi antar-unit kerja serta pembagian tugas yang jelas dalam penggunaan SIPD menjadi elemen penting yang menentukan kesuksesan sistem ini. Ketiadaan sosialisasi yang memadai dan pelatihan yang kontinu dapat memperlambat adopsi teknologi ini secara efektif dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang tepat guna untuk memperbaiki proses penerapan SIPD di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan di dinas terkait, tetapi juga dapat menjadi model bagi instansi pemerintahan lainnya dalam mengoptimalkan penerapan SIPD.

1. Penerapan Sistem

Dalam penerapannya, pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan beberapa upaya, diantaranya:

a. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengadakan pelatihan teknis secara berkala. Pelatihan ini meliputi pemahaman dasar tentang SIPD, cara memasukkan data ke dalam sistem, serta cara membuat dan menganalisis laporan keuangan melalui SIPD. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pegawai daerah dapat menggunakan sistem dengan tepat dan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan pada saat entri data.

b. Sosialisasi Bimtek BPKAD

Sosialisasi mengenai pentingnya SIPD dilakukan baik di lingkungan pemerintahan maupun di kalangan masyarakat. Sosialisasi internal kepada pegawai daerah bertujuan untuk membangun pemahaman akan manfaat SIPD, serta menumbuhkan komitmen dalam penerapannya. Di sisi lain, sosialisasi eksternal kepada masyarakat membantu dalam meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi pengelolaan anggaran daerah (Pemda, 2022).

2. Sistem Informasi Pemerintahan daerah

Secara keseluruhan Sistem Informasi Pemerintah didefinisikan sebagai suatu perubahan atau pembaharuan dari Sistem Informasi pada umumnya yang didefinisikan sebagai kelompok atau unit yang terdiri dari *hardware*, *Software*, dan pekerja yang beroperasi dalam suatu proses teratur dan memotivasi satu sama lain untuk memproses data guna memberikan suatu informasi. Di

sisi lain, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) didefinisikan sebagai manajemen informasi dengan cara teratur berdasarkan aturan kerja yang ditetapkan dengan prinsip ketepatan dan efektivitas dengan harapan dicapainya suatu tujuan organisasi di seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam proses melayani seluruh lapisan masyarakat (Seputra, 2019).

Dikelolanya SIPD memiliki tujuan untuk menjamin bahwasannya informasi daerah dikelola secara professional, hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan informasi terkait pemerintahan daerah, tak terkecuali pada informasi tentang pembangunan dan keuangan daerah, serta memiliki kemampuan untuk menyediakan dan mengontrol informasi pemerintahan daerah lainnya (Nurwani, 2021). Sebagai respons terhadap kewajiban tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur kategori-kategori dalam proses pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh pemerintah daerah, yang dibagi menjadi beberapa bagian berikut:

a. Informasi pengembangan Daerah

Sistem informasi di pemerintah daerah sanggup mengatur data dan informasi yang berhubungan dengan rencana pengembangan daerah, bersangkutan dengan berbagai pihak yang terkait.

b. Informasi Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dapat melewati sistem informasi pemerintah daerah dengan lebih efektif dan efisien melalui bermacam-macam faktor yang terkait, sambil tetap memperhatikan prinsip pertanggungjawaban dan kejujuran. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud mencakup:

- 1) Penyusunan Perencanaan Daerah
- 2) implementasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Pencatatan dan Pemberitahuan Keuangan Daerah
- 4) Akuntabilitas Implementasi Keuangan Daerah
- 5) Akuntabilitas Aset Daerah Informasi Keuangan Daerah lainnya

c. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

Informasi umum lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pemerintahan dapat diakses melalui SIPD. Yang dimaksud dengan informasi umum di sini meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk satu tahun, Peraturan Daerah (PERDA), serta informasi umum lainnya yang diolah oleh berbagai pihak terikat yang memiliki peran dalam pengelolaan pemerintahan daerah. (Nurwani, 2021).

3. Kualitas Laporan Keuangan

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin *elusif* dan *modern*, akses informasi untuk masyarakat umum akan menjadi lebih mudah dan terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan sistem informasi keuangan yang lebih transparan dan dapat membantu proses penguatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Wedana, 2023).

Laporan keuangan adalah dokumen yang memaparkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu atau dalam periode tertentu. Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia, laporan ini digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat (Yulianti, 2023). Kualitas laporan keuangan menggambarkan sejauh mana informasi keuangan yang disampaikan oleh suatu substansi setara dengan standar akuntansi yang berlangsung. Laporan keuangan yang memiliki kualitas baik memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk proses penetapan suatu

keputusan, sementara laporan keuangan dengan kualitas rendah dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah (Amrie Firmansyah, 2022). Kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada cara penyusunannya oleh pihak yang bertanggung jawab. Laporan keuangan yang disajikan tanpa mematuhi standar akuntansi dan tidak dilengkapi dengan bukti transaksi yang dapat diverifikasi cenderung memiliki kualitas yang rendah. Kondisi keuangan suatu daerah mencerminkan sejauh mana keahlian pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya finansialnya. Jika sumber daya tersebut dikelola secara efektif, maka keadaan keuangan pemerintah akan semakin sehat. Keuangan yang stabil menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengeluarannya. Hal ini tercermin dalam kualitas laporan keuangan yang disusun dengan baik (Amrie Firmansyah, 2022). Dalam konteks ini, evaluasi penerapan SIPD di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari seberapa baik sistem ini meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Pada studi ini diterapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang bersifat induktif. Di dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memaparkan serta menjelaskan kondisi atau fakta yang sebenarnya ada di lapangan. terkait pelaksanaan aplikasi SIPD dalam pelaksanaan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bendahara bagian pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang secara aktif berkontribusi dalam memasukkan data laporan Keuangan dicatat dalam aplikasi SIPD, sedangkan informan tambahan dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah Staf PPK SKPD yang terlibat langsung dalam implementasi SIPD. Peneliti memilih informan utama dan tambahan ini karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai cara menerapkan SIPD di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer yaitu melalui proses wawancara secara langsung dengan informan yang telah dipilih, sementara untuk memperoleh data sekunder yaitu berasal dari sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Informan tersebut adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat dan dapat dipercaya tentang aplikasi SIPD. di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan Data skunder berupa artikel dan jurnal yang berkaitan dengan aplikasi SIPD.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mengacu pada model analisis yang sebelumnya telah ditingkatkan oleh Miles dan Huberman. Model ini digunakan untuk mengorganisasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang didapat selama proses penelitian (Dwidya Nitasya, 2024). Dalam penyederhanaan data, informasi utama dan informasi tambahan yang didapat kemudian dipilah-pilah data untuk penyajian dan keperluan analisis data selanjutnya untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah inovasi teknologi yang dikembangkan untuk mengembangkan sistem keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Sistem ini memiliki tujuan untuk meyakinkan bahwa keuangan daerah dikelola dengan cara yang lebih terbuka, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Dinas

Kesehatan Kabupaten Ponorogo, penerapan SIPD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIPD memberikan dampak positif, meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan wawancara yang sebelumnya telah dilakukan dengan Bendahara di Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

"Dengan adanya SIPD, kami merasa proses pengumpulan dan pelaporan data menjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sistem ini membantu kami mengintegrasikan data dari berbagai unit kerja tanpa kesalahan manual yang sering terjadi sebelumnya. Transparansi juga meningkat karena data dapat diakses dan diperiksa lebih mudah oleh pihak yang berkepentingan. Meski pada awalnya ada tantangan dalam mempelajari sistem baru ini, sekarang kami merasa lebih percaya diri. Dengan SIPD, pekerjaan yang biasanya memakan waktu berhari-hari sekarang dapat diselesaikan dalam beberapa jam. Ini tentu membantu kami fokus pada tugas lain yang juga penting."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi laporan keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Dengan sistem ini, integrasi data dari berbagai unit kerja menjadi lebih mudah dilakukan. Ini tidak hanya meringankan kerja tangan, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan.

Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan teknis yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah koneksi jaringan yang tidak stabil, yang seringkali menghambat akses dan pengolahan data di dalam sistem. Selain itu, kurangnya pemahaman teknis dari sebagian pegawai mengenai fitur-fitur SIPD menjadi hambatan dalam memanfaatkan sistem secara optimal. Hal ini sesuai dengan wawancara yang sebelumnya telah dilakukan dengan salah satu staff PPK SKPD sebagai berikut:

"Stabilitas jaringan sering menjadi masalah, sehingga akses ke sistem kadang terhambat. Selain itu, beberapa staf masih membutuhkan pelatihan tambahan karena tidak semua orang memahami fitur-fitur sistem dengan optimal. Hal ini sedikit memperlambat proses di awal penerapan." Ia menambahkan bahwa meskipun tantangan tersebut ada, potensi SIPD untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas sangat besar. "Dengan peningkatan infrastruktur dan pelatihan berkelanjutan, saya yakin SIPD bisa menjadi sistem yang benar-benar mempermudah pekerjaan kami."

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi elemen penting yang memengaruhi keberhasilan penerapan SIPD. Berdasarkan hasil evaluasi, tidak semua staf di Dinas Kesehatan memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem ini. Hal ini mengindikasikan perlunya pelatihan tambahan yang lebih terarah agar semua pegawai dapat menggunakan SIPD dengan baik. Dari perspektif kepatuhan terhadap regulasi, penerapan SIPD telah mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam memenuhi standar yang diimplementasikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan peraturan keuangan lainnya. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam hal validasi data, yang disebabkan oleh proses input manual yang tidak sepenuhnya akurat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa SIPD memiliki potensi besar untuk mengembangkan keterbukaan dalam manajemen keuangan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, pengawasan terhadap alokasi dan penggunaan anggaran menjadi lebih efektif. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan melalui SIPD lebih mudah diaudit karena data sudah terstruktur dengan baik di dalam sistem.

Dalam konteks tantangan yang dihadapi, ada beberapa langkah strategis yang direkomendasikan. Penerapan SIPD di Kabupaten Ponorogo menghadapi beberapa faktor penghambat utama. Salah

satu penghambat terbesar adalah infrastruktur teknologi yang belum memadai, seperti jaringan internet yang sering tidak stabil. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengelolaan dan pelaporan data keuangan. Selain itu, kurangnya pemahaman teknis dari pengguna sistem juga menjadi tantangan. Banyak pegawai yang masih kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur tertentu di SIPD, terutama pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Faktor lain yang turut menghambat adalah terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mendukung pembaruan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang sebelumnya telah dilakukan dengan salah satu staf PPK SKPD, yang mengungkapkan bahwa keterbatasan dana menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas sistem serta SDM terkait sebagai berikut:

“Kami menyadari bahwa kendala seperti koneksi internet yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman teknis pada sebagian staf dapat menghambat kinerja sistem. Untuk mengatasinya, kami telah mengusulkan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan. Kami juga telah mengadakan pelatihan rutin yang dirancang khusus untuk staf yang menggunakan SIPD.”

Pertama, peningkatan infrastruktur teknologi, seperti penyediaan jaringan internet yang lebih stabil, menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung kelancaran operasional SIPD. Infrastruktur yang memadai akan membantu mengatasi kendala teknis yang selama ini sering terjadi. Kedua, pelatihan dan pendampingan secara berkala perlu diberikan kepada pegawai yang bertugas menggunakan SIPD. Program pelatihan ini harus dirancang sedemikian rupa agar dapat meningkatkan pemahaman teknis dan keterampilan pegawai, sehingga mereka mampu memanfaatkan semua fitur yang tersedia di dalam sistem.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap penerapan SIPD juga diperlukan untuk memastikan sistem ini tetap relevan dengan kebutuhan pelaporan keuangan yang dinamis. Evaluasi ini dapat mencakup tinjauan terhadap kinerja sistem, tingkat kepuasan pengguna, serta identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Secara keseluruhan, penerapan SIPD di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaporan keuangan. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat dari sistem ini, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur, pengembangan kapasitas SDM, dan penyempurnaan fitur sistem.

KESIMPULAN

Pengimplementasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaporan keuangan. SIPD mempermudah integrasi data dan mempercepat proses laporan, meskipun menghadapi kendala seperti jaringan yang tidak stabil, keterbatasan pemahaman teknis staf, dan kekurangan dalam validasi data. Kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan SIPD masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai potensi maksimalnya.

SARAN

1. Pemerintah daerah harus memperbaiki infrastruktur teknologi, khususnya jaringan internet, agar operasional SIPD tidak terganggu.
2. Pelatihan teknis yang berkala dan mendalam untuk staf pengguna SIPD diperlukan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengoperasikan sistem.
3. Penambahan fitur validasi otomatis pada SIPD perlu dilakukan untuk mengurangi kesalahan

input data manual, serta pembaruan sistem agar sesuai dengan kebutuhan dinamis pelaporan keuangan.

4. Penerapan SIPD harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan sistem ini berjalan optimal, termasuk dari segi kinerja, kepuasan pengguna, dan area perbaikan yang diperlukan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi, berikut adalah rekomendasi untuk meningkatkan penerapan SIPD di Kabupaten Ponorogo:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Pemerintah daerah perlu segera mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas jaringan internet dan perangkat keras pendukung SIPD. Infrastruktur yang memadai akan memastikan operasional sistem berjalan lancar tanpa gangguan teknis yang berarti.
2. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Pelatihan intensif mengenai penggunaan SIPD perlu dilaksanakan secara rutin, mencakup pengenalan fitur-fitur baru dan simulasi penggunaan sistem. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk mendukung peningkatan kompetensi teknis pegawai.
3. Pengawasan dan Evaluasi Berkala: Dibutuhkan mekanisme pengawasan yang konsisten terhadap penggunaan SIPD. Pemerintah daerah harus menyelenggarakan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas sistem serta menerima masukan dari pengguna untuk penyempurnaan fitur.
4. Pengembangan Sistem yang Lebih Adaptif: SIPD perlu terus dikembangkan agar lebih mudah digunakan, termasuk menambahkan fitur validasi otomatis, laporan analitik, dan panduan interaktif untuk membantu pengguna. Hal ini akan mendukung proses pelaporan yang lebih cepat dan akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada 1) Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Amrie Firmansyah, M. R. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 183.
- Dwidya Nitasya, L. H. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Apakah Efektif Dalam Mendukung Pelaporan Keuangan Opd. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2 (1), 246.
- Fatmawati, F. T. (2024). Analisis Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerahrepublik Indonesia(Sipdri) Untuk Penatausahaan Keuangan Didinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur . *Jurnal Nusantara Hasana*, Vol. 4 No. 5, 59.
- Jadongan Sijabat, M. J. (2024). Penerapan Sipd (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dprd Kota. *Jurnal Mirai Management*, Vol. 9 No. 1, 1171.
- Nurwani, M. I. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 9 No. 2, 112.

- Pemda, L. (2022, September 15-16). *Bimtek Sipd Dari Bpkad Kabupaten Ponorogo*. Retrieved From Media Riset Pendidikan Dan Pelatihan Lembaga Informasi Keuangan Dan Pembangunan Daerah: <https://Www.Linkeupemda.Com/Bimtek-Sipd-Dari-Bpkad-Kabupaten-Ponorogo/>
- Saleh, F. F. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Jurnal Indonesia Accounting Research*, Vol. 4 No. 1, 1-2.
- Seputra, N. K. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Locus Majalah Ilmiah Fisip*, Vol. 11 No. 2, 117.
- Tumija, A. H. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 5 No. 1, 82.
- Wedana, P. P. (2023). Penerapan Aplikasi Sipd (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Di Uptd Kesehatan Pengobatan Tradisional. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 453-454.
- Yulianti, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal Of Economic, Business And Accounting*, Vol. 7 No. 1, 642.